# EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PERIZINAN PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

(Studi Di Desa Tapang Perodah Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau)

Oleh:
**MARKUS CARLOS JEKSON**
NIM. E43011014

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

*Email: Markus_carlosjekson92@yahoo.co.id*

## Abstrak

Proses pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sekadau belum berjalan optimal sesuai tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat. Serapan tenaga kerja yang belum proporsional dengan jumlah peningkatan pembukaan lahan perkebunan menyebabkan peningkatan jumlah masyarakat miskin sehingga tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat menjadi belum terlaksana sesuai dengan tujuannya.Tujuan penelitian ingin mendeskripsikan dampak dari pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Tapang Perodah Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini adalah teori Langbein Evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan program pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit belum tepat sasaran dikarenakan masih banyak masyarakat yang mengalami kemiskinan dan terkena dampak sosial dalam kehidupan masyarakat setelah pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, diantaranya ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak pada lapangan pekerjaan berdasarkan data, pada awal tahun pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2005 dengan jumlah 94.642 tenaga kerja dan kembali turun pada tahun 2009 dengan jumlah 94.342 tenaga kerja hal ini menimbulkan jumlah pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang terus meningkat di setiap tahunnya tidak sesuai dengan penyerapan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Sekadau pada umumnya. Dampak pada kemiskinan, berdasarkan data yang ada angka kemiskinan memang sudah mengalami penurunan pada saat baru-baru pembukaan lahan perkebunan pada awal tahun 2005 mencapai hanya 4.321 KK miskin namun beberapa tahun berselang pada tahun 2009 angka kemiskinan meningkat kembali dengan jumlah 5.321 KK miskin dari data tersebut terlihat bahwa pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sekadau masih belum bisa menyerap angka kemiskinan secara maksimal karena setelah beberapa tahun berselang angka kemiskinan kembali meningkat. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan evaluasi kebijakan supaya apa yang menjadi tujuan dari pembuatan peraturan daerah tersebut bisa tercapai dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan peraturan tersebut supaya tidak terjadi penyimpangan maupun hal yang tidak diinginkan lainnya dikemudian hari.

Kata-kata kunci : Evaluasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Pembukaan Lahan, Dampak Sosial

# EVALUATION OF REGIONAL POLICY NUMBER 19 YEAR OF 2009 ABOUT THE LICENSE TO CLEAR THE LAND FOR PALM PLANTATION

(A study at the Tapang Perodah Village at Sekadau Hulu Subdistrict, Sekadau Regency)

## Abstract

The process of land clearance for palm plantation at Sekadau Regency has not been conducted as optimally as it was firstly aimed, that is to improve the community's prosperity. The employment absorption which is not proportional to the number of land clearance for palm plantation causes an increase of the number of poor people. Thus, the aim which was firstly set, to improve the community's prosperity, is not accomplished yet. The objective of this study is to describe the impact of land clearance for palm plantation at the Village of Tapang Perodah at Sekadau Hulu Subdistrict, Sekadau Regency. The theory used to analyse the problem is Langbein theory. The process of evaluation is directed at how far the activities are are implemented as planned. The method of the study is qualitative approach with descriptive research. The result shows that in the process of land clearance for palm plantation did not meet the target as there are still many people deal with poverty and get the social impact, both positive and negative impact, in community life after the land clearance for the palm plantation. Based on the data, the impact of palm plantation on employment in 2005 was 94,642 workers which was lower than the number in 2009 with 94,342 workers. This was caused by the increase of land clearance for palm plantation which is not equal to employment absorption at Sekadau Regency in general. Mean while, the impact on poverty based on the data, the number of poverty had declined during the beginning of land clearance in the early 2005 which there were 4,321 poor families. However, couple year later, particulary in 2009, the number of poverty started increasing; there were 5.321for families. The data indicated that land clearance for palm plantation at Sekadau Regency had not absorbed poverty optimally as the number of poor people increased in the following years. In this case the government should evaluate the policy so that what is aimed in the regional policy can by achieved and the government should control the implementation of the policy in order to avoid the manipulation as well as unwanted cases in the future.

Keyword : Policy Evaluation, Regional Policy, Land Clearance, Social Impact

## A. PENDAHULUAN

Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia sehingga menuntut pemerintah untuk melakukan berbagai cara dalam menekan angka kemiskinan tersebut, salah satu bentuk program pemerintah dalam menekan angka kemiskinan adalah dengan cara membuka lapangan pekerjaan dengan bekerja sama dengan berbagai perusahaan swasta. Semakin meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Sekadau memaksa pemerintah mencari cara untuk membuka lapangan pekerjaan baru untuk menyerap angka kemiskinan di Kabupaten Sekadau.

Kabupaten Sekadau menunjukan bukti dari kerjasama pemerintah daerah dengan pihak perusahaan dalam membuka lapangan pekerjaan untuk menekan angka kemiskinan ditunjukan dengan peningkatan pembukaan luas areal lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sekadau. Berdasarkan Peraturan Mentri Republik



**MARKUS CARLOS JEKSON,** NIM. E43011014
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

Indonesia Nomor 26/Permentan/OT.140/ 2/2007/ Tentang Perizinan Usaha Perkebunan, yang dikeluarkan pada 9 Februari 2007, dimana pembahasan lebih lanjut pada tahap pelaksanaannya melaui Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat Mentri pada tanggal 18 Februari 2007, yang menyatakan bahwa pelaksanaan Peraturan Mentri Republik Indonesia Tentang Perizinan Usaha Perkebunan sudah siap dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan Mentri tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau membuat suatu kebijakan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Perizinan Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit. Peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten ini merupakan suatu upaya Pemerintah Daerah untuk menjalin kerjasama antara pemerintah dengan para investor yang ingin membuka usaha khususnya perkebunan kelapa sawit untuk membuka lapangan kerja baru di wilayah Kabupaten Sekadau guna menyerap tenaga kerja yang ada di Kabupaten Sekadau guna mengurangi jumlah masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Sekadau.

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam program pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit adalah belum sepenuhnya bisa menyerap angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Sekadau secara maksimal, karena pada pembukaan lahan perkebunan pihak investor menyerap tenaga kerja yang mempunyai SDM yang baik dan dapat dinilai dari tingkat pendidikannya.

Adapun realita yang terjadi di masyarakat dalam pembukaan lahan perkebunan di Kabupaten Sekadau sebagai berikut :

1. Terjadi dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat akibat pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit.
2. Belum terserap secara maksimal jumlah tenaga kerja yang ada di Kabupaten Sekadau dengan jumlah pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang terus meningkat.
3. Jumlah masyarakat miskin yang ada belum mengalami penurunan yang berarti.

Melihat berbagai masalah yang ada tersebut, maka perlu penelitian lebih lanjut tentang Evaluasi Peraturan Daerah Sekadau Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Perizinan Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sekadau dengan lokasi penelitian di Desa Tapang Perodah.

Berdasarkan uraian latar belakang peneliti maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada “Evaluasi Peraturan

Daerah Nomor 19 tahun 2009 Tentang Perizinan Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Studi Di Desa Tapang Perodah Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau".

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan memberikan wawasan, dan pengetahuan ilmu pada program studi ilmu pemerintahan khusunya mengenai pelaksanaan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan teori Langbein evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat, rekomendasi, dan evaluasi terhadap peraturan daerah mengeanai pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori Evaluasi

Kata Evaluasi berasal dari Bahasa Inggris *"evalution"* istilah dalam bahasa Indonesia dengan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi "evaluasi" yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif. Pengertian evaluasi yang berasal dari *Oxford advanced leaner's dictionary of current English* evaluasi adalah to find out, decide the amount or value yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. (Arikunto, 2004;1).

Banyak penelitian evaluasi yang dilaksanakan hanya menekankan pada aspek dari program tanpa mencoba menanyakan proses sebelum tercapainya hasil tersebut. Dalam hal ini Patton (1991:60) mengemukakan bahwa suatu proses evaluasi lebih menekankan pada bagaimana suatu hasil atau outcome diperoleh dibandingkan melihat hasil itu sendiri. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam suatu penyelenggaraan suatu program yang dievaluasi memfokuskan pada hasil dari program tersebut.

Langbein (1980:7), mengemukakan tipe-tipe evaluasi kebijakan bahwa ketika semua penelitian evaluasi memperhatikan keberhasilan program dalam bentuk hasil/akibat program, ketika studi lain berfokus pada proses dengan yang program dilaksanakan. Ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan untuk mencapai keberhasilan evaluasi menurut Langbein yaitu :

a. Metode *deskriptif*
b. Metode *causal*

Dalam teori Langbein (1980:7), penulis medeskripsikan dalam proses pelaksanaan kebijakan peraturan daerah tentang perijinan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dikabupaten Sekadau sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam mensukeskan program pemerintah daerah Kabupaten Sekadau.

Evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Evaluasi proses mengarah pada "apa" (what) kegiatan yang dilakukan, "siapa" (who) orang yang ditunjuk sebagai penaggungjawab suatu program, "kapan" (when) kegiatan akan selesai. Evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan didalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Menggunakan metode deskriptif, proses evaluasi mengacu pada pertanyaan-pertanyaan :

1). Apakah program sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ?

Selanjutnya penelitian dengan menggunakan metode sebab akibat, metode ini mengarah pada perubahan yang terjadi. Hasil/outcomes yang diharapkan pada penelitian evaluasi kebijakan mengacu pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

2). Apakah program memberikan hasil yang diinginkan atau tidak.

3). Cara yang bagaimana agar pelaksanaan program dapat memberikan hasil yang terbaik ?

**Gambar 1**

**Kerangka Berfikir Penelitian**

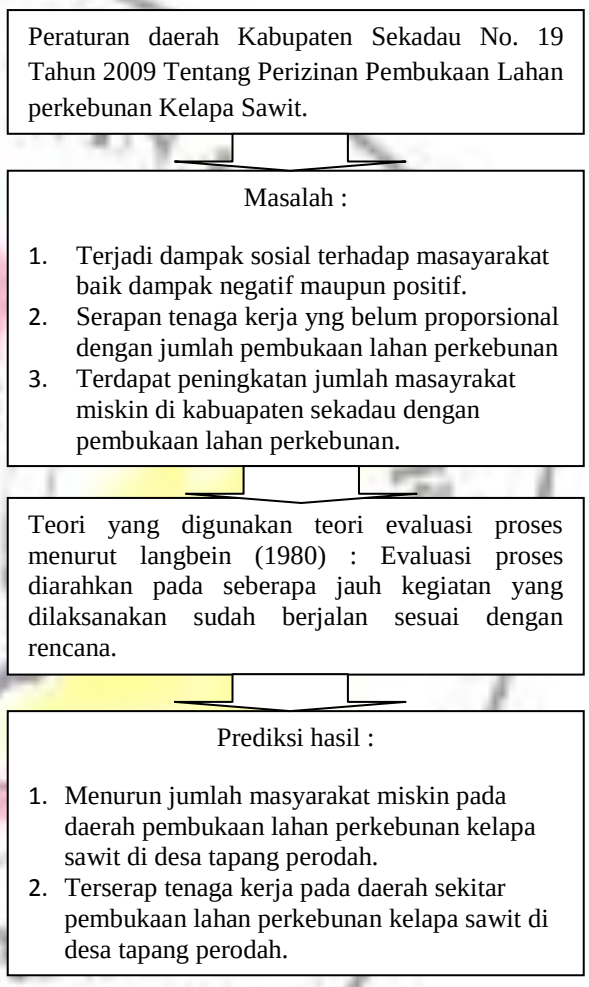


Evaluasi merupakan tahap dimana untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu tujuan dari program. Tanpa evaluasi kita tidak bisa mengetahui seberapa jauh hasil yang dicapai dari suatu program, evaluasi juga menghasilan feedback (umpan



**MARKUS CARLOS JEKSON,** NIM. E43011014
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

balik) yaitu sebagi acuan untuk membuat program baru atau untuk meneruskan program yang dilaksanakan, sehingga kecenderungan yang mengarah pada kegagalan dapat diminimalisir.

## C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yang menggambarkan dan memaparkan masalah perizinan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, berdasarkan data maupun fakta dan informasi yang ada di lapangan.

Penelitian deskriptif ini biasanya tidak menggunakan hipotesis sebagaimana telah diungkapkan oleh Mukhtar yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif ini merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah-langkah penelitian tidak perlu dikemukakan hipotesis.

Berdasarkan gambaran tersebut penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.
2. Tidak mempersoalkan jalinan yang menyebabkan timbulnya suatu gejala atau kenyataan sosial.
3. Penelitian ini tidak menggunakan hipotesis, sehingga dalam analisis data tidak ada pengujian.
4. Memfokuskan penelitiannya pada masalah-masalah saat penelitian ini berlangsung.

Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan

   Dalam tahap penelitian ini, peneliti mencari literatur-literatur yang relevan guna untuk mendapatkan teori. Pendapat-pendapat maupun pandangan para ahli baik itu berupa pokok pikiran yang bersumber dari buku-buku, Koran , internet, dan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Penelitian lapangan

   Dalam tahap penelitian ini, peneliti langsung terjun kelapangan untuk mencari data-data yang diperlukan, sehingga peneliti mendapatkan data-data yang objektif.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Dampak Sosial Terhadap Masyarakat

Dengan adanya pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sekadau dampak sosial pada kehidupan masyarakat di Kabupaten Sekadau terus mengalami perubahan baik itu pada sektor ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Berbagai dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat adalah terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi setiap masayarakat yang berada disekitar pembukaan lahan perkebunan yang tenaga kerja lokal pada sektor perkebunan tersebut, peningkatan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat.

Namun, disamping berbagai dampak positif tersebut berkembang juga dampak negatif yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat seperti, serapan tenaga kerja pada saat beberapa tahun pertama pembukaan lahan perkebunan mengalami tingginya serapan tenaga kerja namun setelah beberapa tahun kemudian mengalami penurunan kembali begitu juga dengan angka kemiskinan belum maksimal penyerapannya yang terjadi masih belum mengalami kepastian.

Berbagai dampak juga dirasakan masyarakat khususnya di Desa Tapang Perodah Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau dampak yang dirasakan masyarakat setempat juga terjadi, dampak positif yang terjadi seperti, terbukanya lapangan pekerjaan serta meningkatnya pendapatan masyarakat dengan adanya lapangan pekerjaan tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu dampak negatif mulai terlihat seperti kesadaran beribadah berkurang, terjadi konflik, terjadi kerusakan lingkungan, dan eksistensi adat berkurang.

**a) Dampak Negatif Yang Terjadi Dalam Kehidupan Masyarakat**

**1) Kesadaran Beribadah Berkurang**

Perubahan yang bergeser kearah yang negatif memang tidak bisa kita hindari, tanpa masyarakat sadari maupun secara sadar masyarakat juga melakukan kekeliruan tersebut. Apalagi di zaman sekarang segala sesuatu yang bersifat negatif sangat mudah ditemui. Seperti yang terjadi pada masyarakat desa Tapang Perodah saat ini, sebagai dampak negatif dari pembukaan lahan perkebunan, banyak masyrakat mengabagikan hal-hal yang sebenarnya sepele dilihat namun sangat berpengaruh besar pada kehidupan mereka yaitu kesadaran masyarakat untuk beribadah pada

hari minggu mulai berkurang karena mereka memilih bekerja entah itu memanen hasil sawit, menebas, maupun menyemprot .

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, setelah terjadi pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit terjadi dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat masalah, kecenderungan masyarakat konsumtif mulai terlihat dari kesadaran masyarakat untuk beribadah mulai berkurang. Setelah terjadi pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit mereka lebih melihat kepentingan duniawi lebih penting dari pada kehidupan kebutuhan rohani, pemikiran yang seperti ini merupakan suatu pemikiran yang keliru yang seharusnya bisa masyarakat sadari dan masyarakat hindari namun itulah kenyataan yang terjadi pada masyarakat saat ini seperti yang terjadi pada desa Tapang Perodah.

**2) Terjadi Konflik**

Konflik, dimana-mana seperti yang terjadi dalam masyarakat konflik akibat pembukaan lahan perkebunan merupakan isu yang masih hangat dan banyak terjadi pada masyarakat sekarang ini. Semakin gencar para pihak investor membuka lahan perkebunan dimana-mana disitu juga isu konflik antara masyarakat dengan pihak perkebunan terus terjadi. Konflik yang terjadi biasanya terjadi akibat kerusakan jalan yang di sebabkan oleh kendaraan pengangkut bahan material perusahaan, penggusuran lahan yang tidak sesuai standar operasional, pematokan lahan milik masyarakat yang tidak menyerahkan lahannya namun dipatok oleh pihak peruasahaan dan yang parahnya bukan hanya konflik antara pihak perusahaan dengan pihak warga masyarakat namun juga terjadi konflik antar keluarga akibat pembukaan lahan perkebunan ini walaupaun hanya sampai tingkat desa pada waktu itu namun tidak seharusnya hal seperti ini terjadi walaupun akibat perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan penuturan salah seorang sumber di atas, masalah mulai muncul bersama pembukaan lahan perkebunan sebagai salah satu contoh konflik dalam masyarakat bahkan sesama keluarga sendiri saja bisa terjadi akibat dari pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang terjadi di desa Tapang Perodah, sangat di sayangkan hal seperti ini bisa terjadi yang seharusnya tidak perlu terjadi namun seperti itulah kenyataan yang terjadi di desa Tapang Perodah setelah pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Pada proses pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang terjadi di Desa Tapang Perodah berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dilapangan masalah pembukaan

lahan perkebunan berdampak pada kehidupan masyarakat dalam hal ini dampak negatif yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

**3) Terjadi Kerusakan Lingkungan**

Terjadi sebagai akibat dari setiap pembukaan lahan pekembangan yang terus meningkat pada setiap tahunnya, pembukaan lahan perkebunan secara besar-besaran bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin parah, sebagai salah satu contoh pencemaran lingkungan air sungai yang terjadi di sekitaran aliaran sungai Kerabat Desa Tapang Perodah. Menurut warga setempat, apabila terjadi hujan air sungai menjadi keruh kekuning-kuningan akibat penggusuran lahan di dekat tepian aliran sungai yang mengakibatkan tanah kuning terseret aliran air hujan yang menaglir ke sungai dimana sungai yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk mandi, mencuci, dan minum menjadi tercemar akibat penggusuran lahan yang tidak memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar lahan padahal dulu pada saat belum digusur airnya hanya berwarna hitam apabila hujan turun dan tidak pernah terjadi kekuning-kuningan airnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang narasumber di atas, hasil menunjukkan bahwa pada proses pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit berdampak negatif pada kehidupan masyarakat sekitar pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di sekitar Desa Tapang Perodah. Dampak negatif yang timbul bisa berdampak pada kehidupan masyarakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sekarang untuk air minum terpaksa masyarakat harus menggunakan air sumur buatan pribadi karena air sungai sudah tidak layak lagi untuk di konsumsi oleh masyarakat. Kalau sudah begini yang merasakan dampak dan merasakan susahnya adalah masyarakat sendiri. Sementara pihak perusahan tidak bisa memberikan solusi untuk membantu masyarakat setelah terjadi hal seperti ini masyarakat mau berkata apa semua sudah terjadi.

**b) Dampak Positif Yang Terjadi Dalam Kehidupan Masyarakat :**

**1. Terciptanya Lapangan Pekerjaan**

Dampak positif yang seperti ini yang hendak dicapai dari pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di daerah seperti daerah desa Tapang Perodah. Terciptanya lapangan pekerjaan yang tentunya akan menyerap tenaga lokal maupun luar daerah akan mengurangi jumlah pengangguran yang ada di desa Tapang Perodah semakin banyak terserap



**MARKUS CARLOS JEKSON,** NIM. E43011014
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

tenaga kerja yang ada di desa maka akan berpengaruh pula pada angka kemiskinan yang secara pasti akan menekan angka kemiskinan yang ada di daerah. Seperti yang terjadi di desa Tapang Perodah saat ini sudah banyak masyarakat yang bekerja pada perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pekerjaan tersebut cukup membantu masyarakat dalam peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat yang ada di desa Tapang Perodah.

**2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat**

Seperti yang terjadi di desa Tapang Perodah saat ini, masyarakat banyak yang bekerja pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di desa Tapang Perodah baik dari anak muda sampai pada orang tua. Masyarakat merasa cukup terbantu dengan dibukanya lahan perkebunan kelapa sawit tersebut, dengan bekerja pada perusahaan perkebunan tersebut masyarakat bisa mendapat tambahan pendapatan dari bekerja. Selain bekerja secara harian masyarakat juga bekerja secara borongan yang bisa bekerja pada hari minggu untuk mendapat tambahan lain seperti memanen, menyemprot, dan menebas. Dengan begitu peningkatan ekonomi masyarakat juga terjadi, dengan pendapatan masyarakat yang ada dengan bekerja pada perusahaan masyarakat bisa membagun rumah, membiayai anak sekolah, biaya hidup sehari-hari, menabung di CU untuk biaya pendidikan anak dikemudian hari ketika mereka sudah tidak bisa bekerja lagi.

**2. Dampak Pada Lapangan Pekerjaan**

Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit merupakan suatu terobosan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang terus terjadi dengan cara bekerja sama dengan pihak swasta, serapan tenaga kerja pada wilayah dimana pembukaan lahan perkebunan menjadi tujuan yang diharapkan oleh pemerintah, cara yang dilakukan oleh pemerintah tersebut hanya untuk membantu masyarakat guna meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dalam segi ekonomi. Pihak swasta juga sudah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dengan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat disekitar pembukaan lahan perkebunan untuk membantu perekonomian masyarakat. Walaupun kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta sudah baik namun kendala yang ada dilapangan masih belum bisa diatasi dengan baik serapan tenaga kerja yang diserap dari desa sekitar pembukaan lahan perkebunan tersebut masih belum maksimal hal itu terlihat dengan hasil

wawancara yang dilakukan dengan beberapa orang yang menjadi narasumber peneliti.

Berdasarkan data, walaupun sudah berjalan dengan baik dan dampak terhadap masyarakat sudah mulai terasa namun dalam hal ini pada poin penyerapan tenaga belum berjalan secara maksimal apa yang menjadi tujuan utama yaitu menekan akan kemiskinan dengan penyerapan tenaga kerja yang maksimal namun setidaknya kerja sama pemerintah dan pihak swata sudah mulai melahirkan dampak positif bagi masyarakat khususnya di Desa Tapang Perodah.

Berdasarkan data, pada tahun awal pembukaan lahan perkebunan dari tahun 2005 sampai pada tahun 2006 jumlah masyarakat yang bekerja sempat mengalami kenaikan dan pada tahun 2007 kembali mengalami penurunan sampai pada tahun 2011 pada tahun 2012 kembali mengalami kenaikan jumlah masyarakat yang bekerja namun, hal ini tidak bertahan lama karena pada tahun 2013 dan tahun 2014 jumlah masyarakat yang bekerja mengalami penurunan kembali. Berdasarkan data yang ada penyerapan tenaga kerja yang ada masih belum maksimal sesuai apa yang menjadi harapan masayarakat dan pemerintah karena beberapa tahun berselang perusahaan sedikit demi sedikit mulai melakukan pengurangan jumlah karyawannya karena berbagai permasalahan. Jumlah pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang terus meningkat di setiap tahunnya tidak sesuai dengan penyerapan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Sekadau pada umumnya.

### 3. Dampak Pada Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu problem sosial yang amat serius. Langkah awal yang perlu dilakukan dalam membahas masalah ini adalah mengidentifikasi apa sebenarnya yang dimaksud dengan miskin atau kemiskinan dan bagaimana mengukurnya. Konsep yang berbeda akan melahirkan cara pengukuran yang berbeda pula. Setelah itu, dicari faktor-faktor dominan (baik yang bersifat kultural maupun struktural) yang menyebabkan kemiskinan. Langkah berikutnya adalah mencari solusi yang relevan untuk memecahkan problem dengan cara merumuskan strategi mengentaskan kelompok miskin atau masyarakat miskin.

Berdasarkan data yang ada, angka kemiskinan memang sudah mengalami penurunan pada saat baru-baru pembukaan lahan perkebunan bisa dilihat pada tahun 2005 pada saat awal pembukaan lahan perkebunan dimana jumlah KK miskin 4.321 kemudian pada tahun 2006 dan 2007

mengalami penurunan jumlah Kk miskinnya, namun pada tahun 2008 dan 2009 dan pada tahun 2009 jumlahnya mencapai 5.321 dan pada tahun 2010 dan 2011 mengalami penurunan kembali setealh tahun 2012 kembali mengalami kenaikan jumlah Kk miskinnya dengan jumlah 4.321 dan ditahun 2013 dan tahun 2014 kembali mengalami penurunan karena pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit terus terjadi degan jumlah yang besar sehingga menyerap jumlah tenaga kerja yang ada dan menekan angka kemiskinan yang ada.

Dapat disimpulkan dari data tersebut perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sekadau secara namun masih belum maksimal karena setelah beberapa tahun berselang angka kemiskinan kembali meningkat.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti peroleh, ada beberapa kesimpulan yang peneliti sampaikan dari "Evaluasi Peraturan Daerah No 19 Tahun 2009 Tentang Perizinan Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Tapang Perodah " yaitu:

1. Dampak pada lapangan pekerjaan

   Pembukaan lahan perkebunan tersebut menyerap tenaga kerja masyarakat daerah Desa Tapang Perodah, pada saat awal pembukaan lahan perkebunan tersebut banyak dari masayarakat desa Tapang Perodah yang bekerja sebagai karyawan kantor, lapangan bahkan karyawan harian yang diterima sebagai pekerja di perusahaan tersebut untuk masyarakat desa Tapang Perodah sendiri mancapai enam puluh persen masyarakat bekerja pada perusahaan namun setelah beberapa bulan kedepan masyarakat sudah banyak yang diberhentikan dengan berbagai alasan dari pihak perusahaan, hal ini akan berpengaruh besar pada kehidupan masyarakat yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pembukaan lapangan pekerjaan memang sudah terjadi namun, masih belum mkasimal dalam proses penyerapan tenaga kerja seperti yang terjadi di desa Tapang Perodah.
2. Dampak pada angka kemiskinan

   Bagi sebagian masyarakat dengan bekerja pada perusahaan merupakan tempat dimana masyarakat bisa mendapatkan hasil yang cukup untuk

memenuhi kehidupan baik itu menabung, membangun rumah, memberikan biaya pendidikan anak bagi mereka yang bekerja di kantor perusahaan untuk kategori kemiskinan mereka bisa dikatakan tidak lagi miskin karena kondisi baik itu keuangan maupun makan mereka tercukupi secara baik, bisa dikatakan perusahaan perkebunan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa walaupun hanya sebagian kecil mereka yang bekerja di kantor yang bisa bertahan lama bekerja dan dapat meningkatkan pendapatan mereka tetapai tetap saja jumlah masyarakat masih belum bisa menurun secara maksimal jumlah masyarakat miskin.

## F. SARAN

Adapun saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam membuka lahan perkebunan pemerintah juga memperhatikan bagaimana serapan terhadap tenaga kerja yang ada di desa sekitar pembukaan lahan perkebunan karena banyak perusahaan yang masih menggunakan tenaga kerja dari luar daerah dimana malah warga pendatang yang banyak bekerja pada perusahaan hal ini akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat pribumi hal ini perlu di antisipasi oleh pemerintah dan para perusahaan supaya tidak terjadi konflik di kemudian hari.
2. Bagi aparatur pemerintah, dalam melaksanakan program yang bertujuan membantu masyarakat dalam pembukaan lapangan pekerjaan supaya lebih memperhatikan dampak sosial yang akan terjadi pada masyarakat miskin di desa dan setelah program tersebut berjalan sebaiknya terus dilakukan kontrol ataupun evaluasi dengan mencari informasi tentang seperti apa masalah yang ada dilapangan, apakah program berjalan sesuai apa yang menjadi keinginan bersama atau tidak. Supaya tujuan dari peraturan tersebut dapat tercapai dengan hasil yang diharapkan salah satunya menekan angka kemiskinan yang ada di daerah.

## G. REFERENSI

### 1. Buku-Buku:

Arikunto. 2000. *Menyusun Rencana Penelitian:* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

……...2004. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*: Jakarta: Bumi Aksara.

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik* : cetakan III. Bandung: Alfabeta.

Daryanto, 2008. *Evaluasi Pendidikan:* Jakarta: Rineka Cipta.

……1998. *Tingkat Keberhasilan Program, Badan Penelitian Dan Penegembangan Dan Pengembangan Kesejahteraaan Sosial:* Depertemen Sosial RI.

Dunn, Wiliam N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik:* Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Prees.

Kartono, K. 1986. *Metode Penelitian:* Yagjakarta: Gadjah Mada.

Moleong, L,J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif:* Bandung: PT. Remaja Rosdakaya.

……2004. *Metode Penelitian Kualitatif:* Bandung: PT. Remaja Rosdakaya.

Mustopadidjaya. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik:* Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Nasir.1988. *Metode Penelitian:* Bandung: Ghalia Indonesia.

Nawawi, H. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial:* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*: Bandung: Tarsito.

Wibawa, Samodra dkk (1994: 29). *Evaluasi Kebijakan Publik:* Jakarta: Intermedia.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik dan Proses*: Yogyakarta: Media Pressindo.

Sugiyono. 2007. *Statistika Untuk Penelitian:* Bandung: CV. Alfabeta.

Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Apikasi):* Cetakan II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugito dkk. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Fisip Untan*: Pontianak: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

**2. Undang-Undang :**

Peraturan Mentri Republik Indonesia Nomor 26 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan.
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau No. 19 Tahun 2009 Tentang Perizinan Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit.